

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tiap-tiap tahapan tersebut adalah :

1. Penyusunan Rencana

Pada tahapan penyusunan rencana Pemerinrah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi, termasuk menyelenggarakan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tahapan penyusunan rencana ini dilakukan berdasarkan tinjauan keadaan atau riview terhadap hasil dari perencanaan sebelumnya.

2. Pelaksanaan dan tata cara penyusunan RKPD

Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman kepada RPJMD, kemudian mengacu kepada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Rancanagn awal RKPD adalah hal penting untuk menentukan kualitas dari proses penyusunan RKPD, rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

3. Penentuan Prioritas Pembangunan

Kemudian ditentukan dengan Musrenbang melalui forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah program pembangunan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

4. Evaluasi/Pelaporan

Dalam hal evaluasi dilakukan penilaian-penilaian terhadap rencana maupun pelaksanaannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan sebagai pendukung penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya, dari hasil ini dapat dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan selanjutnya dan penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan itu sendiri.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam bidang pembangunan daerah dimasa yang akan datang :

1. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuannya, bahwa kegiatan pembangunan dilakukan dengan berbagai tahapan. Salah satunya adalah tahapan penyusunan, dimana pada tahapan ini dijelaskan bahwa adanya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dapat membangun komunikasi yang baik dengan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan daerah.

Hasil akhir Indeks Kepuasan Masyarakat ini dibuat sebagai bahan informasi bagi pimpinan sekaligus sebagai tolok ukur untuk mengambil kebijakan maupun upaya peningkatan mutu pelayanan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan. Dan diharapkan dapat membantu berjalannya proses

perencanaan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah dan hasil akhirnya pun dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat luas.

